

DUGAAN KERACUNAN MBG DI KECAMATAN BAWANG, OMBUDSMAN JATENG TEMUI SEKDA KABUPATEN BATANG.

Selasa, 29 September 2026 - jateng

Semarang - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, Siti Farida beserta jajaran melakukan koordinasi dan pemantauan terkait kasus dugaan keracunan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Kantor Bupati dan Puskesmas Bawang, Kabupaten Batang pada Jum'at (25/9/2026).

"Dari koordinasi tersebut kami memperoleh perkembangan penanganan kasus, pelayanan terhadap masyarakat terdampak, serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam merespons kejadian tersebut," ujar Farida.

Pemerintah Kabupaten Batang telah membentuk Satgas MBG sebagai bagian dari upaya mengantisipasi, mengoordinasikan, dan menindaklanjuti kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di wilayah Kabupaten Batang. "Bahwa terkait dugaan kejadian keracunan, saat ini sampel telah dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta. Pemeriksaan laboratorium tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai kondisi dan kemungkinan penyebab kejadian," ucapnya.

"Oleh karena itu, Ombudsman Jateng menghormati proses pemeriksaan dan tidak mengambil kesimpulan mengenai penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang diperoleh," lanjut Farida.

Pada pertemuan tersebut Sekertaris Daerah Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih menegaskan komitmennya. "Bagi masyarakat yang mengalami dampak dugaan keracunan MBG dan mendapatkan perawatan di rumah sakit pemerintah maupun puskesmas, maka biaya perawatannya sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang," ujarnya.

Siti Farida mengapresiasi langkah cepat dan prima, oleh beberapa puskesmas dan RSUD di Kabupaten Batang dalam memberikan pelayanan sehingga korban dapat tertangani dan tidak mengalami hal yang tidak diharapkan.

"Namun menjadi PR pemerintah ketika hasil pemeriksaan penyebab kasus kejadian adalah dari MBG maka perlu dikaji adanya tanggung jawab dari Pengelola (SPPG), karena ini menjadi tanggung renteng atas produk yang dikeluarkan menjadi penyebab kasus keracunan bagi penerima manfaat, hal ini tidak dapat dihindari, dan ini merupakan bagian dari Maladministrasi yang merugikan masyarakat maupun perorangan sebagai penerima manfaat. Bila hal ini dikenakan, maka akan menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelola SPPG sehingga setiap SPPG akan lebih berhati-hati dan memenuhi standar dalam menyediakan MBG kepada penerima manfaat," tegas Farida.

Dalam kondisi saat ini, Siti Farida mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan respons pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan akibat kejadian tersebut.

Pada hari yang sama Siti Farida dan jajaran melakukan monitoring di Puskesmas Bawang, masih terkonfirmasi ada 22 yang menjalani rawat inap, dalam kesempatan tersebut Siti mendapatkan keterangan dari seorang lansia yang mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan MBG yang dibawa pulang oleh anggota keluarganya.

"Dalam keterangannya sang kakek memakan MBG yang seharusnya dikonsumsi oleh cucunya namun karena tidak dikonsumsi dan mubazir nantinya makanan tersebut kemudian dikonsumsi oleh sang kakek. Tidak lama setelah mengonsumsi makanan tersebut, yang bersangkutan mengalami kondisi yang tidak enak badan dan kemudian datang ke

Puskesmas Bawang untuk mendapatkan penanganan," lanjut Farida.

Farida menambahkan saat ini pasien lansia tersebut telah mendapatkan penanganan secara cepat dan baik oleh petugas Puskesmas Bawang. Respons tersebut menjadi bagian penting dalam monitoring Ombudsman Jateng, khususnya dalam melihat sejauh mana pelayanan kesehatan dapat memberikan penanganan yang cepat kepada masyarakat yang mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.

"Temuan tersebut juga menjadi perhatian karena makanan MBG yang semula diperuntukkan bagi penerima manfaat dapat dibawa pulang dan kemudian dikonsumsi oleh anggota keluarga lain yang bukan merupakan penerima manfaat langsung," tegas Farida.

Siti Farida menyampaikan bahwa pentingnya edukasi kepada penerima manfaat mengenai penanganan, penyimpanan, batas waktu konsumsi, serta risiko memberikan makanan MBG kepada pihak lain. Farida menekankan bahwa aspek keamanan pangan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan MBG. Hal tersebut menjadi semakin penting karena penerima manfaat program mencakup kelompok masyarakat dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam, antara lain peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita.

"Dalam hal ini, Ombudsman Jateng mendorong agar hasil pemeriksaan laboratorium dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan MBG dapat menjadi bahan perbaikan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan, sehingga penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai standar dan memberikan perlindungan yang optimal kepada seluruh penerima manfaat," tutup Farida.